

BAB VIII.

LINGKUNGAN PERMUKIMAN

8.1. Permasalahan Pemukiman Kumuh

Pada tahun 2007 Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Denpasar melakukan studi tentang "Identifikasi Kawasan Pemukiman Padat/Kumuh dan Pembuatan Design Engeering Detail (DED) Pemukiman Padat/Kumuh di Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Barat & Denpasar Utara Kota Denpasar. Hasil laporan menunjukkan terdapat 80 lingkungan/dusun yang teridentifikasi mempunyai kawasan pemukiman padat/kumuh. Lingkungan/dusun yang punya pemukiman padat/kumuh tersebar di enam (6) desa/kelurahan di Kecamatan Denpasar Barat, empat (4) desa/kelurahan di Denpasar Utara, enam (6) desa/kelurahan di Denpasar Timur, dan di 10 desa/kelurahan di Denpasar Selatan.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian derajat kekumuhan ini meliputi :

1. Kesesuaian peruntukan dengan RUTRK / RDTRK.
2. Status (pemilikan) lahan.
3. Letak/kedudukan lokasi kawasan kumuh.
4. Tingkat kepadatan penduduk.
5. Jumlah penduduk miskin (pra-sejahtera & sejahtera -1).
6. Kegiatan usaha ekonomi penduduk disektor informal.
7. Kepadatan rumah/bangunan.
8. Kondisi rumah/bangunanan.
9. Kondisi tata letak rumah/bangunan.
10. Kondisi prasarana dan sarana lingkungan meliputi : a) penyediaan air bersih, b) jamban keluarga/MCK, c) pengelolaan sampah, d) saluran air/drainase, e) jalan setapak, dan f) jalan lingkungan.
11. Kerawanan kesehatan (ISPA, diare, penyakit kulit, usia harapan hidup) dan lingkungan (bencana banjir, kesenjangan sosial)
12. Kerawanan sosial (kriminlitas, kesenjangan sosial)

Hasil analisis dari studi yang dilakukan menunjukkan bahwa derajat kekumuhan kawasan padat/kumuh di Kota Denpasar hanya berada pada derajat kekumuhan B – C. Untuk Kota Denpasar nilai B dimasukkan dalam derajat kekumuhan yang *tinggi*, dan nilai C termasuk derajat kekumuhan *sedang*. Hasil analisis menunjukkan terdapat 25 (31,25 %) lingkungan/dusun yang mempunyai derajat kekumuhan dengan scoring B, sisanya 55 (68,75 %) lingkungan/dusun derajat kekumuhannya dengan scoring C. Tidak adanya pemukiman

padat/kumuh di Kota Denpasar yang mempunyai scoring A karena semua kawasan pemukiman padat/kumuh yang teridentifikasi bila dilihat dari kesesuaian tata ruang sudah tepat, yaitu berada pada wilayah yang memang untuk kawasan pemukiman. Timbulnya skoring kekumuhan B-C terutama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu status kepemilikan lahan, kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, kepadatan rumah, tata letak rumah/bangunan, dan ketersediaan sarana dan prasarana (air bersih, jamban, pengelolaan sampah, saluran air/drainase, jalan setapak, dan jalan lingkungan)

Pesatnya perkembangan kawasan pemukiman padat/kumuh di Kota Denpasar disebabkan oleh tingginya migran yang masuk ke suatu wilayah ini. Kelompok migran yang menciptakan kawasan kumuh dan padat adalah mereka yang datang ke suatu daerah dengan bekal modal dan keterampilan yang sangat terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan mereka hanya mampu menggunakan fasilitas yang terbatas pula, termasuk fasilitas untuk tempat tinggal dan beraktivitas.

Faktor kedua yang sangat dominan menyebabkan berkembangnya kawasan padat/kumuh di Kota Denpasar adalah cara para migran untuk mendapatkan tempat tinggal. Seluruh kawasan padat/kumuh yang teridentifikasi di Kota Denpasar merupakan tanah yang di sewa oleh para migran. Seseorang mengontrak sebidang tanah yang relatif luas dengan masa kontrak yang relatif lama (belasan bahkan sampai puluhan tahun). Di lahan tersebut kemudian dibangun bedeng-bedeng dengan luas yang terbatas dari bahan bangunan yang seadanya, atau lahan dikavling dalam ukuran tertentu. Selanjutnya petak-petak bangunan atau petak-petak lahan tersebut disewakan lagi kepada pendatang lain yang membutuhkan tempat tinggal. Secara fisik pemukiman padat/kumuh mempunyai ciri : bangunan terbuat dari bahan seadanya (kayu, gedek, triplek, dan seng bekas bahkan ada yang berdinding kardus).

Pemilik lahan maupun pengontrak, ketika kemudian menyewakan lahan/kamar di kawasan tersebut tidak menyediakan sarana yang memadai. Persoalan air bersih, fasilitas MCK, drainase, sampah dan sebagai menjadi masalah yang sangat serius untuk ditangani di kawasan pemukiman padat/kumuh. Karena terbatasnya ketersediaan sarana tersebut, maka pencemaran terhadap lingkungan (tanah, air dan udara) pun sangat potensial terjadi dan sangat sulit dikendalikan.

Melihat tingginya kecenderungan pertumbuhan pemukiman padat/kumuh di Kota Denpasar, menunjukkan bahwa belum banyak upaya yang mampu dilakukan untuk menekan keadaan tersebut. Namun demikian, untuk mengatasi berbagai masalah yang pada kawasan permukiman padat/kumuh telah banyak dilakukan upaya-upaya untuk menekan permasalahan yang ada, seperti perbaikan jalan lingkungan maupun jalan setapak di pemukiman kumuh. Program animas merupakan program yang dilaksanakan untuk

mengatasi masalah sanitasi di pemukiman padat/kumuh. Program-program tersebut ada yang dilakukan oleh pemerintah dan ada pula yang dilakukan oleh pihak swasta atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sebagai tindaklanjut dari studi yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Kota Denpasar pada tahun 2007 di atas, pada tahun 2008 ini telah dilakukan pembangunan di dua lokasi pemukiman kumuh, yaitu di Dusun Tulang Ampiyang, Pemecutan Kaja dan Dusun Wangaya Kelod, Dauh Puri sesuai dengan DED yang telah dibuat.

- **Meningkatnya Kasus DBD**

Sampai tahun 2007 penyakit Demam Berdarah Dangu (DBD) masih menjadi salah satu penyakit dengan penderita terbanyak (BPS, 2008). Penyakit DBD adalah salah satu penyakit menular yang harus dicegah dan diberantas, karena penyakit ini bisa mengakibatkan kematian dan berpotensi menjadi wabah. Penyakit DBD masih merupakan masalah kesehatan yang serius di Kota Denpasar karena dari tahun ke tahun penderitanya selalu ada dan sangat ber potensi untuk menjadi wabah, sehingga memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan sistematis. Kasus DBD dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 8.1. Kasus DBD di Kota Denpasar tahun 2001 - 2007

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kematian
1.	2001	753	8 orang
2.	2002	2.198	8 orang
3.	2003	1.540	5 orang
4.	2004	1.022	4 orang
5.	2005	1.851	8 orang
6.	2006	3.017	22 orang
7.	2007	3.264	10 orang

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Pada tahun 2007 kasus penyakit DBD menyebar di seluruh wilayah Kota Denpasar. Di wilayah Denpasar Barat terjadi 814 kasus, Denpasar Utara 412 kasus, Denpasar Timur 389 kasus, dan 1.649 kasus di wilayah Denpasar Selatan. Sebagai diketahui bahwa vektor yang menularkan penyakit ini adalah nyamuk *Aedes aegypti*. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kebersihan lingkungan pemukiman masih merupakan faktor penyebab utama tingginya kasus DBD yang terjadi. Selain itu faktor karakter penduduk Kota Denpasar dengan

mobilitas yang cukup tinggi juga memberikan sumbangan yang cukup penting dalam penularan penyakit tersebut.

Dalam upaya menekan tingginya kasus tersebut, di Kota Denpasar telah dilakukan beberapa cara seperti berikut:

1. Upaya pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan melakukan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) dan melakukan abitasi pada tempat-tempat penampungan air yang ditemukan ada jentiknya. Kegiatan ini dilakukan empat putaran pertahun.
2. Upaya Penemuan, Pertolongan, dan Pelaporan. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas kesehatan dan masyarakat. Pada tahun 2007 ditemukan 3.264 kasus di rumah sakit negeri maupun swasta.
3. Upaya pengamatan dan penyelidikan epidemiologi. Dalam kegiatan ini petugas puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi berdasarkan laporan kasus (3.264). Penyelidikan dilakukan terhadap 65.280 KK, dengan hasil PE positif 149 fokus.
4. Upaya penanggulangan. Kegiatan penanggulangan meliputi :
 - a. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan sarana-sarana pelayanan kesehatan masyarakat seperti RS (negeri maupun swasta) dan puskesmas untuk segera menginformasikan apabila menemukan kasus DBD, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan segera.
 - b. Bekerjasama dengan kepala desa atau lurah untuk mengadakan kegiatan kerja bakti kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing minimal seminggu sekali.
 - c. Melakukan kegiatan foting focus di lokasi dengan jumlah sekitar 2.980 rumah.
 - d. Penyuluhan kesehatan masyarakat.

8.2. Masalah Sanitasi Lingkungan

Sanitasi lingkungan merupakan bagian dari upaya menciptakan kesehatan masyarakat, melalui suatu usaha kesehatan yang bertujuan untuk mengadakan pencegahan ataupun penolakan terhadap faktor-faktor yang dapat menimbulkan suatu penyakit. Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya penyakit terhadap manusia antara lain keadaan udara, air, cuaca atau iklim serta kehidupan penduduk itu sendiri untuk menjaga sanitasi lingkungan yang baik, maka unsur-unsur lingkungan hidup, baik lingkungan fisik, biologis, sosio ekonomis dan lain-lain harus diciptakan dalam kondisi menyenangkan dan dapat diterima, dalam rangka memberikan kenikmatan maupun keberlanjutan hidup, bagi manusia itu sendiri.

Pemerintah Kota Denpasar dalam usaha meningkatkan sanitasi lingkungan telah membangun sejumlah sarana dan prasarana kesehatan untuk memberikan pelayanan

kesehatan yang optimal kepada masyarakat, namun dalam pemberian pelayanan yang dilakukan sampai saat ini tidak terlepas dari kekurangan atau kelemahannya. Hal ini dapat dilihat dari usaha Kota Denpasar membangun sarana dan prasarana kesehatan, dimana Denpasar Timur dua (2) buah puskesmas, Denpasar Selatan Tiga (3) Puskesmas dan Denpasar Barat Dua (2) Puskesmas dan Denpasar Utara 3 buah Puskesmas dari sepuluh (10) buah puskesmas yang dimiliki kota Denpasar, ternyata Denpasar Barat dari 35.017 kepala keluarga (KK) masih ada kepada keluarga yang tidak memiliki jamban keluarga (septic tank) sebanyak 4.394 keluarga (12,55%) kemudian disusul Denpasar Utara dari 29.745 kepala keluarga ternyata 2.273 kepala keluarga (7,64%) tidak memiliki jamban keluarga (septic tank), Denpasar Selatan sebanyak 120 kepala keluarga (0,50%) tidak memiliki jamban dan Denpasar Timur sebanyak 44 kepala keluarga (0,40%) tidak memiliki jamban keluarga. Bila dijumlahkan Kota Denpasar tidak memiliki jamban keluarga tahun 2008 sebanyak 6.831 kepala keluarga (35,86%) dari 10.650 kepala keluarga. Hal ini disebutkan beberapa kepala keluarga hanya memiliki satu buah jamban keluarga.

- **Masalah Air Bersih**

Masalah air bersih telah diatur dalam Undang-Undang Republik Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, namun di lapangan sumber daya air masih belum mendapatkan proteksi yang cukup. Semakin langkanya air bersih, tanpa disadari masyarakat harus membayar biaya yang tinggi untuk mendapatkan segelas air yang layak bagi kesehatan. Kota Denpasar mempunyai karakteristik geografi dataran yang sempit, sehingga permasalahan penyediaan air bersih terjadi karena banyaknya pengambilan air bawah tanah sehingga pada musim kemarau permukaan bawah tanah menurun.



Gambar 8.1. Sumur dan fasilitas MCK di kawasan kumuh di Kota Denpasar

Wilayah Kota Denpasar penyediaan air bersih secara umum belum bermasalah, namun kedepan perlu diperhatikan, sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk yang terus berlangsung dan perkembangan pembangunan industri pariwisata dan pertanian, maka sumber daya air akan semakin banyak diperlukan walaupun ada beberapa daerah air dari PDAM mengalami penurunan airnya.

Ketersediaan sumber daya air dari waktu ke waktu relatif sesuai dengan daur hidrologi, namun keberadaan dan sifat kualitasnya dapat membatasi pemakaian dan pemanfaatannya. Dalam rangka memenuhi kegiatan pembangunan yang berkelanjutan maka konsep dasar mengenai daur sumber daya air perlu dipahami. Dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan konservasi sumber daya air sehingga dapat menunjang pembangunan.

Pemenuhan kebutuhan air bersih rumah tangga mempunyai peranan penting dalam menjaga produktivitas maupun kestabilan kondisi sosial dan politik, walaupun sebagian masyarakat belum dapat menikmati jaringan air bersih. Tekanan atau permasalahan yang lain untuk penyediaan air bersih di Kota Denpasar berupa kendala topografi dan kondisi geologis sebagai pembentuk lapisan akuifer, disamping disebabkan oleh pemanfaatan air bawah tanah yang terus dilakukan oleh penduduk.

Permasalahan penyediaan air bersih di Kota Denpasar dikoordinasikan oleh PDAM dengan cara mendistribusikan ke seluruh wilayah, pada tahun 2007 sambungan baru pelanggan mencapai 64.824 dan pada tahun 2008 naik menjadi 65.349 sambungan.

Kebutuhan air bersih sebagian masyarakat Kota Denpasar bersumber dari permasalahan daerah air minum (PDAM), sebagian lagi berasal dari sumber lain seperti air tanah dan air permukaan. Total volume distribusi air bersih PDAM Kota Denpasar sebesar 27.564047 m³ / tahun, dengan rincian untuk sosial sebanyak untuk rumah tangga (non niaga) sebanyak 23380434 m³ / tahun, untuk niaga sebanyak 2.895008 m³ / tahun, industri 571876 m³/tahun dan lain-lain sebanyak 716729 m³/tahun. Bila dilihat dari jumlah pelanggan, penggunaan air bersih PDAM sebagian besar dimanfaatkan oleh rumah tangga non niaga sebanyak 56.115 pelanggan, niaga sebanyak 7.956 pelanggan, industri sebanyak 375 pelanggan dan lain-lain 903 pelanggan.

- **Masalah Sampah**

Upaya meningkatkan kemampuan mengelola sampah dari tahun ke tahun terus dilakukan, namun perilaku masyarakat dengan berbagai kondisi sosial-ekonomi perkotaan yang cenderung menambah permasalahan sampah kota. Membutuhkan program dengan tindakan yang revolusioner menyangkut penegakan kaedah/aturan hukum serta komitmen pelaksanaan dari semua pihak. Permasalahan sampah di Kota Denpasar tidak hanya karena jumlah sampah yang sangat besar melainkan juga sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan pengelolaan itu sendiri. Jumlah sampah yang dihasilkan Kota Denpasar terjadi peningkatan jumlah sampah yang signifikan terjadi dari tahun ke tahun seiring dengan jumlah penduduk. Rata-rata sampah yang terangkut oleh pihak DKP Denpasar setiap hari mencapai sekitar 2.000 m³/hari, sedangkan sampah yang dihasilkan penduduk Kota Denpasar diperkirakan sebesar 2.500 m³/hari. Sisa sampah yang tidak terangkut ke TPA sebesar 500 m³/hari berasal dari wilayah dengan pembuangan sampahnya seperti menimbun di belakang rumah, membakar dan masih ada yang membuang sampahnya ke sungai.



Gambar 8.3. Masih adanya timbulan sampah liar sebagai bukti perilaku adalah hal prinsip dari pengelolaan sampah

a. Kondisi

1. Permasalahan sampah di Kota Denpasar tidak hanya karena jumlah sampah yang sangat besar melainkan juga sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan pengelolaan.
2. Diperkirakan 20% sampah yang dihasilkan penduduk Kota Denpasar tidak terkelola dengan baik sehingga mengancam upaya kebersihan dan kesehatan kota.